



PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBER

# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Tata Pemerintahan. Kinerja Bagian Tata Pemerintahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023.

7 Februari 2024

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**



**ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM.**

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	7
A. RENCANA STRATEGIS .....	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	11
C. PERJANJIAN KINERJA .....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	18
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2023 .....	18
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	19
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	62
BAB IV. PENUTUP. ....	66
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026. **Rumusan Tujuan** Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember “**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Berdaya Dan Akuntabel**” antara lain sebagai berikut:

1. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi dan kerjasama daerah;
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
4. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
5. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil

pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 100%.

*Sasaran 2* : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 100%.

*Sasaran 3* Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 100%.

*Sasaran 4* Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 100%.

*Sasaran 5* Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Kurang**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 33%.

*Sasaran 6* Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan tidak dapat diukur karena tidak dianggarkan dalam DPA. Penganggaran lebih difokuskan pada kegiatan yang mendukung visi misi Bupati

*Sasaran 7* Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 100%.

*Sasaran 8* Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indikator sasaran, dengan capaian 100%.

*Sasaran 9* Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indicator sasaran, dengan capaian 100%.

*Sasaran 10* Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran indicator sasaran, dengan capaian 100%.

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh BAGIAN TATA PEMERINTAHAN telah dilaksanakan dengan baik. Dari 10 indikator sasaran ada 1 indikator sasaran yang tidak dapat diukur karena tidak dianggarkan pada DPA karena penganggaran lebih berfokus pada kegiatan yang menjadi visi dan misi Bupati. Dari 9 indicator sasaran sebanyak 7 indicator pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan dan 1 indicator dalam kategori Kurang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp 2.066.753.210**. 91,6% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp **1.894.392.210** dan Belanja Modal sebesar 8,4% atau sebesar **Rp 172.361.000**.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 1.898.574.528,-** atau **91,86 %** dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD, honor lembur ASN yang telah dianggarkan tidak dapat dicairkan sesuai dengan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah web aplikasi SILPPD dan E-SPM diakomodir oleh Kemendagri dan Pemprov selanjutnya proses input pelaporan dilakukan secara daring melalui replikasi dan integrasi oleh Pemkab Jember.
3. Nilai SSH terlalu tinggi tidak sesuai dengan harga pasar pada pengadaan barang dan jasa.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Adanya pemahaman yang berbeda terkait maksud dari narasi capaian indikator kinerja.
2. Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delegasi kewenangan Bupati kepada Camat.
3. Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang.
4. Adanya insidental penundaan/pembatalan rakor. Terkadang OPD menindaklanjuti tidak sesuai dengan hasil rakor.
5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri No.22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga;
6. Proses kerjasama antar daerah terkadang terhambat oleh kebijakan pemimpin daerah lainnya untuk lebih bersikap terbuka dan mengerti pentingnya kerja sama sudah dapat terwadahi dalam kerangka APKASI Korwil Jawa Timur;
7. Belum tersedianya anggaran fisik konsultasi penegasan dan penetapan batas wilayah yang memadai.
8. Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD.
2. Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD pada Bimtek LPPD.
3. Perlunya penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD.
4. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara.
5. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
6. Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja kelurahan dan kecamatan.
7. Fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi intensif.
8. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
9. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya.
10. Mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama
11. Optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil Jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di Jawa Timur;
12. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait SOP tahapan penyusunan dokumen kerja sama dan memberikan reviu rancangan dokumen kerja sama
13. Pelaksanaan inventarisasi rupa bumi di semester 1 tahun 2024
14. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan fisik penegasan batas wilayah.
15. Pengusulan formasi ASN melalui anjab, ABK, dan Bezetting pegawai kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk formasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Tata Pemerintahan

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2023

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Tata Pemerintahan adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Tata Pemerintahan
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Tata Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Tata Pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Tata Pemerintahan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah ;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , terdiri dari:
  1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
    - a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari
    - a. Sub Bagian Protokol
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bagian Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## 2) **Bagian Tata Pemerintahan**

- a. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris Daerah melalui Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- b. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- c. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
  - b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, serta otonomi daerah;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
  - d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **Bagian Tata Pemerintahan** terdiri dari **8 ASN** dan **9 Non ASN** . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada **Bagian Tata Pemerintahan** :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Bagian Tata Pemerintahan**  
**berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2023**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bagian	1	
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	Hasil penyetaraan jabatan eselon 4 a menjadi fungsional
3	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	1	
4	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	1	
5	Bendahara	1	
6	Pengadministrasi Umum	1	
7	Pengadministrasi Otonomi Daerah	1	
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Bagian Tata Pemerintahan**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	4
3	Penata	III/c	1
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	-
6	Pengatur Tingkat I	II/d	-
7	Pengatur	II/c	-
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
9	Pengatur Muda	II/a	-
10	Juru Tingkat I	I/d	-
11	Juru	I/c	-
12	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Bagian Tata**  
**Pemerintahan**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	2	ASN
4	D4	-	ASN
5	S1	3	ASN
6	S2	4	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	2	Non ASN
10	D3	1	Non ASN
11	S1	5	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	

## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran **Bagian Tata Pemerintahan**, yaitu:

1. Adanya ego sektoral instansi vertikal serta perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah (Kabupaten (Kecamatan, kelurahan) dan desa);
2. Kurangnya literasi dan cepatnya rotasi sebagian petugas penyusun LPPD mengakibatkan ketidaksinkronan data kecepatan bekerja dan dokumen pendukung yang disampaikan sehingga dengan pergantian petugas maka harus dilaksanakan penyesuaian kembali dalam proses pengumpulan data, bukti dan input ke dalam aplikasi e-LPPD.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan baik perijinan dan non perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan, utamanya dengan terbitnya

UU Cipta Kerja maka perlu pendefinisian ulang akan kewenangan kecamatan terutama yang terkait dengan perizinan.

4. Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
5. Ditetapkannya undang undang baru tentang Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya sehingga perlu dilakukan pengkajian penyusunan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Jember.
6. Peningkatan kerjasama daerah baik kerjasama dengan daerah lainnya atau dengan pihak ketiga untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten Jember memerlukan upaya dan kebijakan yang sinergis dari para pemangku kepentingan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Bagian Tata Pemerintahan merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Stategis Bagian Tata Pemerintahan mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

1) Misi ke- : 2

**“Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya”**

2) Tujuan ke- : 1

**“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualias pelayanan publik”**

3) Sasaran Strategis Kabupaten :

**-Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan **Bagian Tata Pemerintahan**

sebagaimana termuat didalam rencana Strategis **Bagian Tata Pemerintahan.**  
Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN TATA  
PEMERINTAHAN TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1: Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Indikator Tujuan : Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (dokumen,%)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2023	2023	2024	2025	2026
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>							
Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember	Persentase OPD yang Menyusun LPPD sesuai Petunjuk	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan dan perangkat daerah	Persentase bahan kebijakan urusan pemerintahan dan otonomi daerah	60%	70%	80%	85%	90%	95%
	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan KDH/WKDH	85%	90%	95%	97%	100%	100%
	Persentase hasil rapat koordinasi wilayah pejabat pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja	90%	95%	95%	95%	97%	98%

	dan sesuai dengan pedoman						
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan pedoman	90%	92%	95%	97%	97%	98%
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai dengan standar pelayanan	91%	95%	97%	97%	98%	98%
Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama daerah Kabupaten Jember	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	65%	70%	85%	90%	93%	95%
Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah	94%	95%	96%	96%	98%	100%
	Persentase pembakuan nama rupabumi yang terinventarisir	94%	95%	96%	96%	98%	100%
<b>SETELAH PERUBAHAN</b>							
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun			100	100	100	100

Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun			100	100	100	100
Peningkatan Kualitas	Persentase administrasi			96,14	96,60	97,35	97,80

Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Tata pemerintahan yang terfasilitasi						
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti			100	100	100	100

Sumber data : tabel 4.1 Tabel T-C.25 pada Rencana Strategis Perubahan Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026

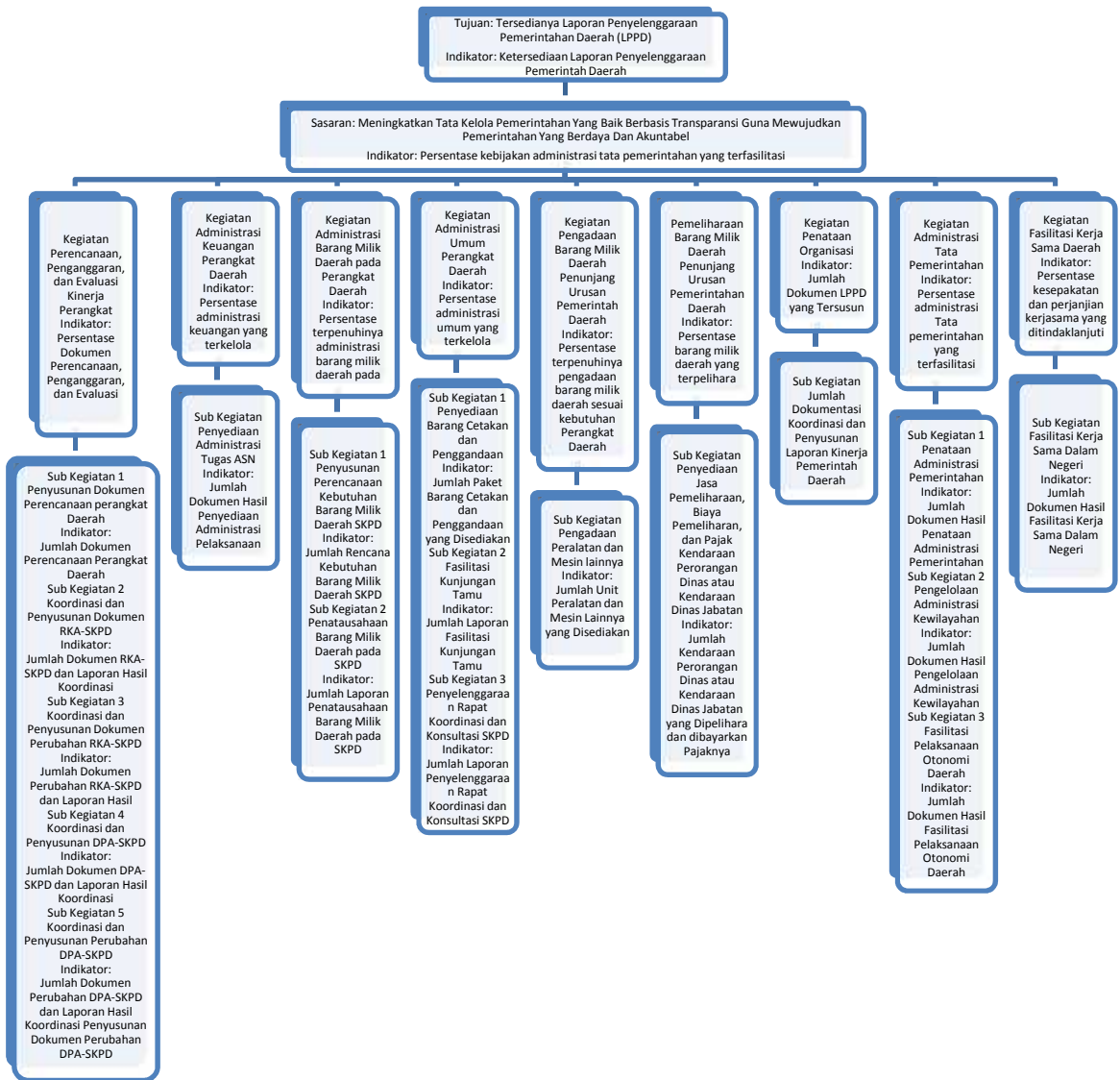
## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Bagian Tata Pemerintahan. melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

*Cascading* Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut :



### **C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor **065/ 178.1 /1.11/2023** Tahun 2023.

### I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Data LPPD Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>a. Tersedianya Dokumen LPPD</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007</li> <li>- Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se- Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data</li> <li>- Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri</li> </ul>		

		<p>dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat</li> <li>- Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Monitoring Kecamatan /Kelurahan</li> <li>- Rapat Rakor Camat</li> <li>- Laporan PATEN Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</li> <li>- Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah</li> </ul>		

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <p>1. Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/ Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021)</li> <li>- Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya</li> <li>- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya</li> <li>- Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat</li> </ul> <p>2. Rapat Rakor Camat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dalam rangka menindaklanjuti keadaan dinamis yang berkembang di lapangan, sosialisasi kebijakan pemerintahan di wilayah kecamatan</li> </ul> <p>3. Laporan PATEN Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan ,waktu layanan feasible )</li> <li>- Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN</li> </ul>		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan</li> <li>4. Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</li> </ul> </li> <li>5. Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Rupabumi/Toponimi yang masuk dalam aplikasi SINAR BIG (Badan Informasi Geospasial)</li> </ul> </li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	<p>Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang Ditindaklanjuti</p> $\frac{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI</li> <li>- Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO</li> <li>- Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja</li> </ul>		

		<p>Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah.</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <p>1. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020)</li> <li>- Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga</li> <li>- Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman ( MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantive</li> </ul> <p>2. Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya kegiatan RAKERWIL APKASI</li> </ul> <p>3. Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO</li> </ul> <p>4. Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah.</p>		
--	--	---	--	--

		- Terlaksananya rapat dengan TKKSD		
--	--	------------------------------------	--	--

## II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan/pedoman}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<b>Penjelasan:</b> a. Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang seharusnya disusun (7 Dokumen) - RKA - DPA - RKPA - DPPA - RENJA - RENJA PERUBAHAN - LAKIP		

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman dan</li> <li>- tersusun tepat waktu</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan (6 item):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Belanja Natura dan Pakan Natura</li> <li>- Belanja Perabot Kantor</li> <li>- Belanja Mamin aktivitas lapangan</li> <li>- Belanja tagihan air</li> </ul> <p>Dokumen-dokumen tersebut disajikan dalam Rekapitulasi bulanan</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> <li>- Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD</li> </ul>		

Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun}}{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi barang yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan</li> <li>- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</li> <li>- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</li> </ul> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terangarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> <li>- Terangarkan sesuai ketentuan Pedum APBD</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD

		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Pengelola Keuangan</li> <li>- Honorarium Pejabat PBJ</li> <li>- Honorarium tenaga administrasi</li> <li>- Honorarium tenaga kebersihan</li> <li>- Pembayaran internet</li> <li>- Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakai adat)</li> <li>- Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan</li> <li>- Laporan Kunjungan Kerja</li> <li>- Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</li> </ul> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terangarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> <li>- Terangarkan sesuai ketentuan Pedum APBD</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD

		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Pengadaan barang di Bagian Tata Pemerintahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang hasil pengadaan</li> <li>- Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang</li> </ul> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> <li>- Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Penyediaan jasa di Bagian Tata Pemerintahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat</li> <li>- Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> </ul>		

		- Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dan Siap Pakai}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : - pemeliharaan rutin/ service berkala dan - perbaikan atas kerusakan/ - penggantian spare part b. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer		

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026.

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%
5.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%
6.	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%
8.	Peningkatan Kualitas Laporan	Jumlah Dokumen LPPD yang	100%

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusun	
9.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,14%
10.	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 27.382.400
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 480.501.191
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 15.186.284
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 309.660.400
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 172.361.000
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 20.100.000
7. Penataan Organisasi	Rp. 24.005.800
8. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 543.346.235
9. Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp. 474.209.900
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.066.753.210</b>

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka **Bagian Tata Pemerintahan** didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tahun 2023 sebesar **Rp. 2.066.753.210 (terbilang Dua Milyar Enam puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah)**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Tata Pemerintahan dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Bagian Tata Pemerintahan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (memadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 10 sasaran dan 10 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	33%	33%
6	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 penganggaran lebih memprioritaskan pada kegiatan yang menjadi visi dan misi bupati	
7	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%

8	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	100%	100%
9	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi pemerintahan yang terfasilitasi Tata yang	96,14%	96,14%	100%
10	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	96,5%	96,5%

*Sumber Data:* tabel 4.1 Tabel T-C.25 pada Rencana Strategis Perubahan Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021-2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 10 (sepuluh) indikator sasaran Bagian Tata Pemerintahan namun pada tahun 2023 ini untuk sasaran strategis nomor 6 tidak dianggarkan dalam DPA karena penganggaran lebih difokuskan pada kegiatan yang mendukung visi misi Bupati. Oleh karena itu, dari 10 indikator sasaran Bagian Tata Pemerintahan yang dapat diukur hanya 9 indikator sasaran. Rata rata dari 9 indikator sasaran mencapai mencapai 92,16% dan masuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Bagian Tata Pemerintahan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Tata Pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Tata Pemerintahan tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	-	-	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	-	-	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	0%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	-	-	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	0%	33%
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur

Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara			100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun			100%	50%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi			96,14%	72,8%	95%	96,14%
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti			100%	296%	102%	96,5%

*Sumber Data: Realisasi Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2023*

Tabel 3.2 menunjukkan perbandingan realisasi tiga indikator tersebut pada tahun 2023 dengan realisasi tahun sebelumnya.

Data target pada tahun 2021 dan 2022 tidak disajikan pada tabel 3.2 sehubungan sasaran dan indikator sasaran tersebut dirumuskan pada Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah. Sehingga tabel 3.2 hanya dapat menyajikan perbandingan realisasi selama 3 periode pemerintahan, namun untuk target tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia data sehubungan untuk indikator tersebut baru termuat dalam renstra perubahan tahun 2023.

Berdasarkan data capaian pada Bagian Tata Pemerintahan, perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022 menunjukkan realisasi optimal 100% pada 6 kategori, 96% pada 2 kategori, 33% pada 1 kategori. Pada kategori dengan persentase 33% yaitu kategori Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan mendapatkan nilai tersebut disebabkan karena pada tahun 2023 ini kebutuhan pengadaan barang pada Bagian Tapem lebih kecil dari yang ditargetkan pada Renstra Perubahan dan pengadaan yang telah dilaksanakan

telah mencukupi kebutuhan pada tahun 2023. Pada kategori Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan tidak dapat diukur disebabkan karena pada tahun 2023 ini anggaran yang ada difokuskan untuk menunjang sub kegiatan lain yang lebih mendukung Visi dan Misi Bupati Jember.

Tabel 3.3 menunjukkan perbandingan realisasi tiga indicator tersebut pada tahun 2023 dengan target pada akhir periode renstra / target tahun 2026 untuk mengetahui tingkat kemajuan dari realisasi tahun 2023. Dari tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan capaian sasaran di Bagian Tata Pemerintahan telah sesuai dengan target akhir periode Renstra.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA (TAHUN 2026)	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA (TAHUN 2026)	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	100%	100%
5	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	100%	33%	33%
6	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 penganggaran lebih memprioritaskan pada kegiatan yang menjadi visi dan misi Bupati	
7	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%
8	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	100%	100%
9	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	97,80%	96,14%	98%
10	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	96,5%	96,5%

*Sumber Data: Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan 2023, Renstra Perubahan Bagian Tata Pemerintahan 2021 – 2026, Realisasi Kinerja Bagian Tata Pemerintahan 2023*

Tabel 3.3 menunjukkan perbandingan realisasi tiga indikator tersebut pada tahun 2023 dengan target pada akhir periode renstra / target tahun 2026 untuk mengetahui tingkat kemajuan dari realisasi tahun 2023. Dari tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemajuan capaian sasaran di Bagian Tata Pemerintahan 8 dari 9 sasaran strategis telah sesuai dengan target akhir periode Renstra.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	-	
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	-	
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	-	

4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	100%	-	
5	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	33%	-	
6	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 penganggaran lebih memprioritaskan pada kegiatan yang menjadi visi dan misi Bupati	-	
7	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	-	
8	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	-	
9	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,14%	-	
10	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	96,5%	-	

Sumber Data: Realisasi Kinerja Bagian Tata Pemerintahan 2023

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan diukur dengan formulasi Jumlah seluruh Dokumen Perencanaan yang tersusun dibagi Jumlah Dokumen perencanaan yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan / pedoman) x 100%. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun ada 7 dokumen yaitu RKA, DPA, RKPA, DPPA, RENJA, RENJA PERUBAHAN, dan LAKIP. Keseluruhan dokumen telah disusun sesuai ketentuan/pedoman, diukur dengan:

- Telah melalui reviu/verval pada PD koordinator/pembina yaitu inspektorat, Bagian Organisasi, BPKAD dan BAPPEDA.
- Telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang stabil. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembanding / benchmark untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

### **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Kualitas administrasi keuangan pada Bagian Tata Pemerintahan diukur dari perbandingan Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana sesuai pedoman dengan jumlah seluruh administrasi keuangan pada Bagian Tata Pemerintahan dikali 100%. Administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan adalah sebanyak 12 dokumen dimana berisi terdiri dari sebanyak 6 (enam) item, yaitu belanja peralatan dan perlengkapan kantor, belanja natura dan pakan natura, belanja perabot kantor, belanja mamin aktivitas lapangan, belanja tagihan air.

Keseluruhan administrasi keuangan tersebut diatas, tersusun sesuai ketentuan / pedoman, diukur dengan:

- teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan sesuai Kepmendagri dan
- sesuai ketentuan Pedoman Pelaksanaan APBD dan standar satuan harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi sesuai target atau termasuk kategori capaian sangat memuaskan/ 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang stabil. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembandingan / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

### **Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Kualitas Administrasi Barang pada Bagian Tata Pemerintahan diukur dari perbandingan jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan yang tersusun dibagi Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan dikali 100%. Administrasi Barang Mlik Daerah yang seharusnya terlaksana ada 3 dokumen yaitu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD), RKBD Perubahan, dan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Keseluruhan administrasi keuangan tersebut diatas, tersusun sesuai ketentuan / pedoman, diukur dengan:

- Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan
- Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi sesuai target atau termasuk kategori capaian sangat memuaskan/ 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang stabil. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat

kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembandingan / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

#### **Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Kualitas Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan diukur dari jumlah dokumen Administrasi Umum yang terlaksana sesuai pedoman dibagi jumlah Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan dibagi 100%. Jumlah Administrasi Umum yang seharusnya terlaksana pada Bagian Tata Pemerintahan adalah Honorarium Pengelola Keuangan, Honorarium Pejabat PBJ, Honorarium tenaga administrasi, Honorarium tenaga kebersihan, Pembayaran internet, Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olahraga dan pakaian adat), Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Laporan Kunjungan Kerja, dan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Dengan dukungan ketersediaan administrasi umum tersebut menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi penatausahaan dan pelaporan keuangan, dukungan terhadap program disiplin pakaian dinas aparatur di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi sesuai target (100%) atau termasuk kategori capaian sangat memuaskan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang stabil. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (table 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembandingan / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

#### **Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan diukur dari perbandingan Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi dibagi Jumlah Pengadaan Baran Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan

dikali 100%. Pengadaan Barang di Bagian Tata Pemerintahan meliputi Barang hasil pengadaan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang.

Keseluruhan Pengadaan Barang Milik Daerah tersebut diatas, tersusun sesuai ketentuan / pedoman, diukur dengan:

- Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan
- Teranggarkan sesuai Pedum APBD

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi tidak sesuai target pada Renstra Perubahan disebabkan karena kebutuhan pada tahun 2023 telah tercukupi sesuai dengan yang dianggarkan di DPA. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang dinamis. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang belum optimal yaitu 33%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembandingan / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

### **Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Pada data tabel 3.1, Sasaran Strategis 6 tidak dapat diukur karena tidak dianggarkan pada DPA karena anggaran yang ada lebih difokuskan untuk kegiatan yang lebih prioritas..

### **Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Kualitas pemeliharaan barang milik daerah pada Bagian Tata Pemerintahan diukur dari perbandingan Jumlah barang milik daerah (BMD) yang terpelihara dan siap pakai dibagi Jumlah BMD yang dipelihara dikali 100%.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Bagian Tata Pemerintahan meliputi: pemeliharaan rutin/ *service* berkala, perbaikan atas kerusakan, dan / penggantian *spare part*. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi :

- Alat/ bahan untuk kegiatan kantor
- Alat kantor dan rumah tangga  
Komputer

Dengan dukungan pemeliharaan BMD tersebut menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi sesuai target (100%) atau termasuk kategori capaian sangat memuaskan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang stabil. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembanding / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

### **Sasaran Strategis 8: Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**

Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur dengan perbandingan Jumlah OPD yang melaporkan data/ isian kewenangan urusan dibagi Jumlah OPD pengampu urusan LPPD dikali 100%. Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) meliputi tersedianya Dokumen LPPD).

Keseluruhan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut diatas, tersusun sesuai ketentuan / pedoman, diukur dengan:

- Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan
- Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se-Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data
- Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan

- Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat
- Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi sesuai target (100%) atau termasuk kategori capaian sangat memuaskan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang meningkat. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembandingan / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

### **Sasaran Strategis 9: Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah**

Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah diukur dari perbandingan Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi dibagi dengan Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan dikali 100%. Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah meliputi Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan, Rapat Rakor Camat, Laporan PATEN Kecamatan, Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim, Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah.

Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah tersebut diatas, tersusun sesuai ketentuan / pedoman, diukur dengan:

#### **1. Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan**

- Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021)
- Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya
- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya

- Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat

## 2. Rapat Rakor Camat

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dalam rangka menindaklanjuti keadaan dinamis yang berkembang di lapangan, sosialisasi kebijakan pemerintahan di wilayah kecamatan

## 3. Laporan PATEN Kecamatan

- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan ,waktu layanan feasible )
- Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN
- Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan

## 4. Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim

- Terlaksananya Upacara HUT Jember dan HUT Jatim

## 5. Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah

- Jumlah Rupabumi/Toponimi yang masuk dalam aplikasi SINAR BIG (Badan Informasi Geospasial)

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi sesuai target (100%) atau termasuk kategori capaian sangat memuaskan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan *progress* realisasi yang meningkat. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembanding / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

### **Sasaran Strategis 10 : Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah**

Kualitas Kerjasama Daerah diukur dari perbandingan Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan dikali 100%. Kualitas Kerjasama Daerah meliputi Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah,

Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI, Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO, dan Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah.

Kualitas Kualitas Kerjasama Daerah tersebut diatas, tersusun sesuai ketentuan / pedoman, diukur dengan:

1. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah

- Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020)
- Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga
- Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman ( MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memuat hal substantif

2. Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI

- Terlaksananya kegiatan RAKERWIL APKASI

3. Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO

- Partisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO

4. Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah.

- Terlaksananya rapat dengan TKKSD

Pada data tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa realisasi belum sesuai target (96,5%) namun masih termasuk kategori capaian sangat memuaskan. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tersaji pada tabel 3.2, menunjukkan progres realisasi yang menurun karena sebagian besar jumlah kerja sama telah dilakukan pada awal tahun Renstra. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026 (tabel 3.3), menunjukkan tingkat kemajuan yang optimal yaitu 100%. Tidak ada realisasi nasional sebagai pembanding / *benchmark* untuk indikator ini sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023**

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		SM	M	SB	B	C	K	SK
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan IK : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%							
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan IK : Indikator Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%							
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan IK : Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%							
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan IK: Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	33%							
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan IK: Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang	Tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 penganggaran lebih memprioritaskan pada kegiatan yang menjadi visi dan misi Bupati							

urusan Pemerintahan Daerah								
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan IK: Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%							
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IK: Indikator Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%							
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah IK: Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	100%							
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah IK: Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%							
Rata rata capaian	92,16%							

Dari tabel 3.5 diatas menunjukkan hasil evaluasi atas kinerja sasaran menunjukkan predikat Memuaskan dengan rata-rata capaian 92,16%.

Hal ini didukung strategi pencapaian Bagaian Tata Pemerintahan dan dukungan komitmen pimpinan tertinggi dalam upaya mencapainya. Strategi pencapaian sasaran yang dilakukan Bagian Tata Pemerintahan dalam kinerja utama antara lain meliputi strategi peningkatan kualitas LPPD, strategi peningkatan kualitas administrasi tata pemerintahan, dan strategi peningkatan kualitas kerja sama daerah.

#### **A. Strategi Peningkatan Kualitas LPPD**

1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyusunan LPPD kepada petugas penyusun LPPD di tingkat OPD sebagai pelaksana urusan, untuk

meningkatkan pengetahuan, informasi dan meningkatkan kualitas pelaporan;

2. Melaksanakan pendampingan/asistensi kepada petugas penyusun LPPD OPD untuk menginventarisir kendala dalam penyusunan LPPD;
3. Meningkatkan koordinasi baik dengan petugas penyusun LPPD OPD maupun dengan Tim Reviu/Inspektorat;
4. Melaksanakan monitoring ke seluruh Perangkat Daerah pengampu indikator dan evaluasi capaian indikator kinerja kunci;
5. Merevitalisasi pembagian tugas dalam tim penyusun LPPD Kabupaten secara efektif dan terorganisir.
6. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala baik dalam rangka persiapan perencanaan dan integrasi pencapaian SPM kedalam dokumen penganggaran daerah
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi pemenuhan SPM pada OPD pengampu.
8. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyusunan LPPD kepada petugas penyusun LPPD di tingkat OPD sebagai pelaksana urusan, untuk meningkatkan pengetahuan, informasi dan meningkatkan kualitas pelaporan;
9. Melaksanakan pendampingan/asistensi kepada petugas penyusun LPPD OPD untuk menginventarisir kendala dalam penyusunan LPPD;
10. Meningkatkan koordinasi baik dengan petugas penyusun LPPD OPD maupun dengan Tim Reviu/Inspektorat;
11. Melaksanakan monitoring ke seluruh Perangkat Daerah pengampu indikator dan evaluasi capaian indikator kinerja kunci;
12. Merevitalisasi pembagian tugas dalam tim penyusun LPPD Kabupaten secara efektif dan terorganisir.

#### **B. Strategi peningkatan kualitas administrasi tata pemerintahan**

1. Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala antar OPD / kecamatan dan instansi terkait untuk menyamakan persepsi terhadap layanan kepada masyarakat;
2. Melaksanakan monev berkala pada kecamatan dan kelurahan sebagai bentuk pengawasan langsung kepada aparatur kewilayahan;

3. Inventarisasi data-data rupabumi yang akan dikenali, disurvey, dan ditelaah baik dari rupabumi yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun rupabumi yang bersifat budaya pada masyarakat;
4. Melakukan sortasi data nama-nama rupabumi yang telah diinventarisasi yang memiliki kemungkinan untuk dibakukan sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2021 tentang pembakuan nama rupabumi;
5. Melengkapi kecukupan administrasi untuk dilaksanakan survey dan penelaahan nama rupabumi;
6. Melaksanakan survey lapangan;
7. Menentukan peta dasar sebagai peta dasar sebagai rujukan utama untuk melaksanakan penegasan batas wilayah;
8. Menginventarisasi peraturan dasar hukum yang relevan terhadap pendirian suatu wilayah administrasi;
9. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal untuk memastikan validitas dan realibilitas peta dasar dan peraturan dasar hukum yang menjadi dasar adanya suatu wilayah administrasi;
10. Melaksanakan proses penegasan batas wilayah;
11. Melakukan pemetaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan PATEN (kelengkapan administrasi, SOP layanan, waktu layanan feasible);
12. Mentriangulasi data pelayanan di kecamatan dengan peraturan yang relevan;
13. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pelayanan terpadu di kecamatan;
14. Pelaksanaan upacara hari besar HUT Jember dan Jawa Timur dengan melakukan koordinasi intensif kepada OPD dan instansi eksternal.

### **C. Strategi peningkatan kualitas Kerja Sama Daerah**

1. Melaksanakan pemetaan potensi kerja sama daerah;
2. Melaksanakan rapat koordinasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD);
3. Melaksanakan Rapat Kerja Wilayah APKASI sebagai wahana fasilitasi untuk memperluas kerja sama di lingkup Pemkab se Jawa Timur serta potensi kerja sama lainnya dengan pihak ketiga;

4. Mengikuti APKASI EKONOMI EXPO sebagai wahana memperkenalkan potensi daerah dan wahana mengenali potensi daerah lainnya untuk dapat dikerjasamakan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut perjanjian kerja sama daerah yang telah dilakukan;
6. Melaksanakan studi tiru untuk mengambil praktek baik dan keunggulan dari daerah lainnya untuk dapat diinternalisasikan, dikerjasamakan, dan diadopsi;

Beberapa hal penunjang keberhasilan, permasalahan, serta solusi dari sasaran strategis pada tabel 3.5 diatas adalah

### **Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 6 dokumen terpenuhi 6 dokumen dengan rincian 2 dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 1 dokumen RKA-SKPD, 1 dokumen Perubahan RKA-SKPD, 1 dokumen DPA-SKPD, dan 1 dokumen Perubahan DPA-SKPD.
2. Adanya Kerjasama seluruh anggota bagian tata pemerintahan dalam menyediakan data perencanaan dan penganggaran yang koheren.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Adanya keterlambatan pembaharuan data realisasi sehingga terkadang tidak sesuai dengan data penganggaran, aplikasi dari SIPD belum menyediakan fitur realisasi *real time by system*, sehingga data realisasi dilakukan secara manual;

2. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta plotting anggaran terkadang tidak linier dengan tugas dan fungsi sebagaimana dokumen perencanaan.

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Operator perlu lebih aktif dalam memperbaharui data realisasi
2. Perencanaan dan penganggaran hendaknya lebih disesuaikan kembali utamanya dalam hal pagu anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi

## **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 12 dokumen terpenuhi 12 dokumen dengan rincian 1 dokumen setiap bulannya pada tahun 2023.
2. Baiknya usaha dan kerjasama setiap individu dalam menyediakan bukti-bukti untuk melengkapi SPJ yang dibuat setiap bulannya sehingga memudahkan proses pembuatan SPJ.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Adanya kekurangan SDM dalam pengerjaan SPJ mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan sehingga terkadang membuat SDM yang ada kewalahan.
2. Adanya ketidaklengkapan dokumen oleh rekanan sehingga memperlambat pengerjaan SPJ karena harus menunggu rekanan tersebut melengkapi dokumen.

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Perlu adanya penambahan SDM pada Bagian Tata Pemerintahan.

2. Perlu adanya penginformasian di awal tahun mengenai persiapan kelengkapan dokumen pada rekanan.

### **Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 2 dokumen dan 1 laporan terpenuhi 2 dokumen dan 1 laporan dengan rincian 2 dokumen rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan 1 laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
2. Hasil rekonsiliasi sesuai dengan SPJ asset lancar dan LRA

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Adanya keterlambatan dalam pelaporan LRA karena LRA dilakukan bukan by system tetapi manual sehingga perlu sinkronisasi kembali terhadap realisasi keuangan dan SPJ pembelian barang (asset lancar dan asset tetap)

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Perlunya kecepatan dalam pelaporan LRA untuk disesuaikan dengan hasil data input SIPERDA

### **Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 5 paket dan 14 laporan terpenuhi 5 paket dan 14 laporan dengan rincian 5 paket Barang Cetak dan Penggandaan, 2 laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, dan 12 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
2. Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan di Bagian tata pemerintahan terjalin harmonis

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Peningkatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi perlu ditingkatkan kembali untuk memastikan kelancaran proses yang dilaksanakan.

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Meningkatkan koordinasi, kerjasamam dan sinergi untuk kelancaran proses yang dilaksanakan.

#### **Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat kurang yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 33% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 2 paket dan 4 unit terpenuhi 2 unit
2. Adanya Kerjasama yang baik antara Bagian Tata Pemerintahan dan Pejabat Pengadaan dengan Penyedia dalam proses pengadaan barang melalui e-purchasing dalam hal kelengkapan data dan dokumen.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Adanya kekurangpahaman dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-katalog

2. Nilai perkiraan harga barang baik dalam bentuk standart satuan harga perlu disesuaikan agar nilai barang lebih mendekati nilai barang di pasaran sehingga tidak terpaut jauh dan menghasilkan sisa anggaran Silpa

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Perlu adanya pemahaman lebih mendalam lagi bagi operator dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan cara membaca buku manual.
2. Survei harga barang oleh Bagian Pembangunan sekretariat daerah Kab.Jember untuk lebih mencerminkan harga barang riil di lapangan.

### **Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Pada data tabel 3.1, Sasaran Strategis 6 tidak dapat diukur karena tidak dianggarkan pada DPA karena anggaran yang ada lebih difokuskan untuk kegiatan yang menjadi Visi dan Misi Bupati.

### **Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 7 Unit terpenuhi 7 Unit.
2. Adanya komunikasi yang baik antara Bagian Tata Pemerintahan dengan Bagian lain dalam hal pembayaran pajak kendaraan sehingga pembayaran pajak kendaraan dapat terlaksana dengan baik.
3. Adanya anggaran yang dipersiapkan dengan baik untuk pemeliharaan kendaraan khususnya untuk unit yang mengalami perbaikan berat.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Terkadang hasil pemeliharaan masih kurang maksimal sehingga masih terjadi kerusakan pada kendaraan.
2. Waktu tunggu spare part yang lama pada bengkel resmi sehingga harus menunggu barang datang

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Perlu adanya penjaminan kualitas dari hasil perbaikan kendaraan yang dilakukan dari bengkel.
2. Sebelum melakukan pemeliharaan sudah dilakukan estimasi dan pemesanan barang terlebih dahulu.

### **Sasaran Strategis 8: Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 1 dokumen terpenuhi 1 dokumen
2. Adanya Kerjasama OPD untuk memenuhi kelengkapan data LPPD.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Proses yang lama dalam mengumpulkan data oleh OPD.
2. Kurangnya usaha OPD dalam melengkapi data yang sesuai permintaan.
3. Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD;
4. Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD pada Bimtek LPPD;dan
5. Perlunya penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD.

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Mengadakan bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD.

2. Mengadakan penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam Menyusun LPPD

### **Sasaran Strategis 9: Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Telah terpenuhinya target kinerja yaitu dari target sebesar 7 dokumen terpenuhi 7 dokumen
2. Keberhasilan pelaksanaan mengenai rupabumi dan batas wilayah utamanya batas kelurahan serta inventaris nama rupabumi di beberapa Kecamatan di Jember yang pada proses selanjutnya akan mendapatkan penelaahan dari tim Provinsi Jawa Timur dan penelaahan dari tim Rupabumi Nasional dan untuk batas wilayah mendapatkan validasi verifikasi teknis dari Badan Informasi Geospasial (BIG);
3. Kerja sama dengan pihak Topografi Kodam V Brawijaya dan Biro Administrasi Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur menunjang terlaksananya kegiatan teknis Rupabumi dan batas wilayah.
4. Adanya semangat dalam pelaksanaan acara HUT Jatim, HUT Jember, dan HUT RI dan koordinasi antar OPD sesuai bidang tugas untuk penyelenggaraanya;
5. Monev Kecamatan dan Kelurahan dapat dilaksanakan sehingga dapat diketahui kapasitas kelembagaan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kecamatan dan kelurahan serta kendala yang terjadi di lapangan;
6. Adanya notulen hasil rakor yang disepakati/diketahui oleh peserta rakor sehingga menjadi perhatian untuk tindak lanjut dan pelaksanaan di lapangan.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Anggaran fisik pemetaan dan toponimi yang terbatas setiap tahunnya.

2. Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.
3. Belum adanya peraturan pelaksana teknis mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
4. Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delegasi kewenangan Bupati kepada Camat.
5. Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang.
6. Adanya insidental penundaan/pembatalan rakor. Terkadang OPD menindaklanjuti tidak sesuai dengan hasil rakor.
7. Dinamika lapangan yang harus segera disikapi oleh aparatur kewilayahan memerlukan proses koordinasi yang intens dan berjenjang.

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara.
2. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
3. Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja kelurahan dan kecamatan dan mempersiapkan peraturan local yang relevan.
4. Fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi intensif.
5. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
6. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya.
7. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan giat fisik penegasan batas wilayah.
8. Pengusulan formasi ASN melalui anjab, ABK, dan Bezetting pegawai kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk formasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.

## **Sasaran Strategis 10 : Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah**

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah dengan indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Sangat Baik yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan adalah:

1. Keberadaan Tim Kerja Sama Daerah (TKKSD) membantu dalam memberikan analisa dalam penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Semangat kerjasama sama antar daerah dan lembaga yang didukung oleh kebijakan pimpinan untuk terus dapat meningkatkan kecepatan pembangunan melalui kerjasama.
3. Peningkatan kemampuan dan literasi OPD teknis untuk menterjemahkan slogan visi dan misi bupati dalam bentuk peningkatan kinerja melalui kerjasama daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri No.22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga;
2. Proses kerjasama antar daerah terkadang terhambat oleh kebijakan pemimpin daerah lainnya untuk lebih bersikap terbuka dan mengerti pentingnya kerja sama sudah dapat terwadahi dalam kerangka APKASI Korwil Jawa Timur;

Solusi/rencana perbaikan kedepan adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama;
2. Optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di jawa Timur;

3. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait SOP tahapan penyusunan dokumen kerja sama dan memberikan reuiu rancangan dokumen kerja sama.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan. pada tahun 2023 didukung 2 Program 9 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Bagian Tata Pemerintahan tahun 2023**

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

	SKPD			
	Input : Dana	Rp. 27.382.400	Rp. 10.601.500	39%
	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Outcome : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan			

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian  
Tata Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Input : Dana	Rp. 480.501.191	Rp. 464.472.164	96,66 %
	Output : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Outcome : Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan			

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian  
Tata Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Input : Dana	Rp. 15.186.284	Rp. 1.911.000	12,58 %
	Output : Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	2 Dokumen dan 1 Laporan	2 Dokumen dan 1 Laporan	100%
	Outcome : Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan			

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian  
Tata Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			

	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	100%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Input : Dana	Rp. 309.660.400	Rp. 268.701.750	86,77 %
	Output : Jumlah Paket dan Laporan Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	5 Paket dan 14 Laporan	5 Paket dan 14 Laporan	100%
	Outcome : Terpenuhinya Paket dan Laporan Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan			

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah  
Pada Bagian Tata Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	2 Paket	0 Paket	0%

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	4 Unit	2 Unit	50%
Input : Dana	Rp. 172.361.000	Rp. 148.000.000	85,87 %
Output : Jumlah Paket dan Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	2 Paket dan 4 Unit	2 Unit	33%
Outcome : Terpenuhinya Paket dan Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan			



Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : -			

	Sub Kegiatan : -			
	Input : Dana	Rp. 25.650.000	Rp. 0	0%
	Output : Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	1 Laporan	Tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 penganggaran lebih memprioritaskan pada kegiatan yang menjadi visi dan misi Bupati	
	Outcome : Terpenuhinya Laporan Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan			

Sasaran Strategis 7 : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	7 Unit	100%
	Input : Dana	Rp. 20.100.000	Rp. 19.705.926	98,04 %
	Output : Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	7 Unit	7 Unit	100%

Outcome : Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan			
--	--	--	--

Sasaran Strategis 8 : Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Penunjang Urusan Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Penataan Organisasi			
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Input : Dana	Rp. 24.005.800	Rp. 17.014.800	70,88%
	Output : Tersusunnya LPPD Kabupaten Jember	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Dokumen LPPD menjadi tolak ukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari tahun ke tahun			



Dokumen LPPD



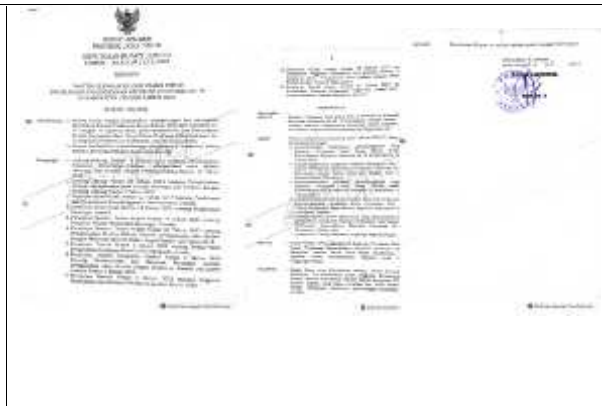
Rapat LPPD

Sasaran Strategis 9 : Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan,  
Kewilayahan dan Otonomi Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan : Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Input : Dana	Rp. 543.346.235	Rp. 519.816.788	95,67%
	Output : Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Outcome : Terpenuhinya Dokumen Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah			



Monev Kelurahan



SK HUT Republik Indonesia



Pelaksanaan HUT Kabupaten Jember



Pelaksanaan HUT Provinsi Jawa timur



Sosialisasi dan Pelaksanaan Penegasan Batas Kelurahan



Kegiatan Rupabumi/Toponimi



Rakor Camat



Sinergitas Kinerja Kecamatan

Pada Pemantauan Penyelenggaraan Nama Rupabumi Kabupaten Jember memperoleh peringkat ke 7 se – provinsi Jawa Timur (detail dapat diakses di <https://cloud.big.go.id/index.php/s/RaporProvinsi2023#pdfviewer>)

Sasaran Strategis 10 : Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-50 Dokumen -Pelaksanaan Rakerwil APKASI -Partisipasi kegiatan APKASI OTONOMI EXPO - Rapat Tim TKKSD	-40 Dokumen -Terlaksananya Rakerwil APKASI - Keikutsertaan pada APKASI OTONOMI EXPO	80% 100% 100% 100%
	Input : Dana	Rp. 474.209.900	Rp. 448.350.600	94,55%
	Output : Jumlah Dokumen	-50 Dokumen	-40 Dokumen	

	<p>Kerjasama Daerah, terlaksananya Rakerwil APKASI, keikutsertaan pada APKASI OTONOMI EXPO (AOE), Rapat Tim TTKSD</p>	<p>MOU &amp; PKS -1 Dokumen Pelaksanaan Rakerwil APKASI -1 Dokumen Keikutsertaan AOE -1 Dokumen Rapat Tim TTKSD</p>	<p>MOU &amp; PKS (80%) -1 Dokumen Pelaksanaan Rakerwil APKASI (100%) -1 Dokumen Keikutsertaan AOE (100%) -1 Dokumen Rapat Tim TTKSD (100%)</p>	<p>95%</p>
	<p>Outcome : Terpenuhinya Dokumen Kerja Sama Daerah</p>			



Penandatanganan MOU



Rapat Kerja APKASI 2023



APKASI OTONOMI EXPO 2023



Rapat TTKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah)

#### B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Bagian Tata Pemerintahan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	38,72%	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	96,66%	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	12,58%	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	86,77%	Efisien
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	33%	85,87%	Tidak Efisien
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Tidak dapat diukur karena pada tahun 2023 penganggaran lebih memprioritaskan pada kegiatan yang menjadi visi dan misi bupati		
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	100%	98,04%	Efisien
Peningkatan Kualitas Laporan	100%	70,88%	Efisien

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	100%	95,67%	Efisien
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	95%	94,55%	Efisien

Sumberdaya Manusia Bagian Tata Pemerintahan berjumlah 17 orang dengan rincian 4 pejabat struktural dan 5 pelaksana dan 8 pelaksana non ASN.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan didukung anggaran sebesar **Rp. 2.066.753.210,- dan terserap sebesar Rp. 1.898.574.528,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Tata Pemerintahan dengan rata- rata capaian **91,86 %**

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp 2.066.753.210**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar **Rp 1.894.392.210**
2. Belanja Modal sebesar **Rp 172.361.000**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 2 Program dan 9 Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan. dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 7.535.800	Rp. 3.812.500	50,59%
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5.293.000	Rp. 0	0%
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 4.318.000	Rp. 3.639.000	84,28%
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 5.117.800	Rp. 0	0%
5	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 5.117.800	Rp. 3.150.000	61,55%
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 480.501.191	Rp. 464.472.164	96,66%
7	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 14.247.240	Rp. 1.911.000	13,41%
8	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 939.044	Rp. 0	0%
9	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.373.000	Rp. 8.168.000	97,55%
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 16.037.800	Rp. 5.317.800	33,16%
11	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 285.249.600	Rp. 255.215.950	89,47%
12	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	-
13	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 172.361.000	Rp. 148.000.000	85,87%
14	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan	Rp. 20.100.000	Rp. 19.705.926	98,04%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
15	Kegiatan Penataan Organisasi			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 24.005.800	Rp. 17.014.800	70,88%
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>			
16	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 35.866.700	Rp. 27.889.300	77,76%
17	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 158.878.475	Rp. 155.205.556	97,69%
18	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 348.601.060	Rp. 336.721.932	96,59%
19	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Rp. 474.209.900	Rp. 448.350.600	94,55%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 2.066.753.210</b>	<b>Rp. 1.898.574.528</b>	<b>91,86%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2023 sebesar **Rp. 1.898.574.528,00** dari total anggaran **Rp. 2.066.753.210,00** atau **91,86%**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka persentase anggaran mengalami penurunan sebesar **3,05%** yaitu dari total anggaran **sebesar Rp. 1.857.288.402,00** terealisasi sebesar **1.857.288.402,00,- atau 94,91%%**. Penurunan ini disebabkan karena:

1. Alokasi anggaran bertambah dari tahun sebelumnya;

2. Masa transisi penyesuaian kegiatan (pembenahan Renstra sekretariat daerah); dan
3. Adanya rencana perubahan *cascading* renstra OPD di lingkup sekretariat daerah (penyesuaian kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi bagian pada lingkup sekretariat).

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Bagian Tata Pemerintahan. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bagian Tata Pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Tata Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan dikategorikan **Memuaskan** karena dari 10 indikator sasaran sebanyak 8 indikator pencapaiannya dalam kategori **Sangat Memuaskan**, 1 indikator dalam kategori **Kurang** dan 1 **tidak bisa diukur** karena tidak dianggarkan dalam DPA.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 1.898.574.528 (91,86%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, terdapat refokusing anggaran pada P-APBD 2023 di Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp. 783.246.790, dengan rincian total dari 20 sub kegiatan sebelum refokusing, 14 sub kegiatan mengalami

pengurangan sebesar Rp. 839.718.225 dimana sejumlah Rp. 56.471.435 dari total pengurangan tersebut digeser pada 3 sub kegiatan lainnya. Sedangkan 3 sub kegiatan sisanya tidak mengalami pengurangan. Adapun pengurangan sebesar Rp. 839.718.225 tersebut di antara lain pada :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar Rp. 530.000
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sebesar Rp. 3.680.000
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sebesar Rp. 3.680.000
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sebesar Rp. 3.680.000
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Sebesar Rp. 3.680.000
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sebesar Rp. 13.620.000
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 58.045.200
- h. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sebesar Rp. 19.499.500
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sebesar Rp. 1.000.000
- j. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Sebesar Rp. 15.984.900
- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Sebesar Rp. 3.680.525
- l. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Sebesar Rp. 18.044.100
- m. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri Sebesar Rp. 56.480.000
- n. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Luar Negeri Sebesar Rp. 638.144.000

Untuk pergeseran anggaran sebesar Rp. 56.471.435

dialokasikan/ditambahkan diantaranya pada sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sebesar Rp. 47.237.525
- b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Sebesar Rp. 6.251.910
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 2.982.000

Sedangkan 3 sub kegiatan sisanya yang tidak mengalami pengurangan adalah pada:

- a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- b. Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya pemahaman yang berbeda terkait maksud dari narasi capaian indikator kinerja.
2. Dalam hal pendelegasian, belum terdapat pengaturan baku dalam delegasi kewenangan Bupati kepada Camat.
3. Belum terdapat aturan teknis mengenai kelurahan dan pendelegasian wewenang.
4. Adanya insidental penundaan/pembatalan rakor. Terkadang OPD menindaklanjuti tidak sesuai dengan hasil rakor.
5. Kurangnya pemahaman perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kerja sama daerah untuk memformulasikan rancangan kerja sama dan memenuhi tahapan penyusunan dokumen kerja sama sesuai dengan Permendagri No.22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja

Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Pemerintah dengan Pihak Ketiga;

6. Proses kerjasama antar daerah terkadang terhambat oleh kebijakan pemimpin daerah lainnya untuk lebih bersikap terbuka dan mengerti pentingnya kerja sama sudah dapat terwadahi dalam kerangka APKASI Korwil Jawa Timur;
7. Belum tersedianya anggaran fisik konsultasi penegasan dan penetapan batas wilayah.
8. Keterbatasan operator aplikasi dan SDM yang memiliki kualifikasi teknis pemetaan dan topografi wilayah

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Perlu adanya bimtek evaluasi LPPD pada capaian kinerja OPD.
2. Menghadirkan narasumber handal terkait penyusunan LPPD pada Bimtek LPPD.
3. Perlunya penunjang kegiatan berupa honor kegiatan bagi OPD dalam menyusun LPPD.
4. Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi anggaran dan peningkatan koordinasi dengan pendukung acara.
5. Mereviu peraturan lokal yang ada mengenai pelaksanaan PATEN di Kecamatan.
6. Monev Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan pendekatan substantif kinerja kelurahan dan kecamatan.
7. Fasilitasi kinerja kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi intensif dan keikutsertaan pada pengukuran kinerja kecamatan Provinsi Jawa Timur.
8. Perlunya koordinasi lanjutan setelah rakor agar hasil rakor dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
9. Perlu OPD yang membidangi untuk hadir pada saat rakor sesuai dengan tupoksinya.

10. Mengoptimalkan peran dan keterlibatan TKKSD dalam penyusunan rancangan kerja sama
11. Optimalisasi kerja sama antar daerah melalui APKASI Korwil jatim sehingga dapat lebih mempererat saling keterhubungan dan keterikatan antar kabupaten di Jawa Timur;
12. Mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait SOP tahapan penyusunan dokumen kerja sama dan memberikan review rancangan dokumen kerja sama
13. Pelaksanaan inventarisasi rupa bumi di semester I tahun 2024
14. Pelaksanaan penegasan batas kelurahan di semester I tahun 2024
15. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan gisik penegasan batas wilayah.
16. Pengusulan formasi ASN melalui anjab, ABK, dan *Bezetting* pegawai kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM untuk formasi teknis pemetaan dan topografi wilayah.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

Jember, 7 Februari 2024

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN



ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.

Pembina

NIP.198410252003121003

RENCANA STRATEGIS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Transparansi guna Mewujudkan Pemerintahan yang Berdaya dan Akuntabel	1 Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan 2 Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun  Persentase administrasi keuangan yang dikelola			100%	100%	100%	100%	1. Memfasilitasi penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peningkatan Kualitas Rumusan Kebijakan yang Mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Guna Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	1. Menyediakan Kebutuhan Kajian Dalam Rangka Pembangunan Jember 2. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Administrasi pemerintahan Dan Kebutuhan Kerjasama Daerah yang Disertai Penguatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

## LAMPIRAN 1

								Daerah	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan (Pelaksanaan Bimtek)	
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
4	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%	100%	100%	100%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
5	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

## LAMPIRAN 1

		han							
6	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
7	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

## LAMPIRAN 1

	8	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
		Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,1 %	96,6 %	97,3 5%	97,8 %	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN SUDARMAN NOMOR 1 JEMBER TELEPON (0331) 428824

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HADI SASMITO, S.H., M.Si  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEMBER,**



**HADI SASMITO, S.H., M.Si**  
NIP. 196804071998031009

Jember, 21 November 2023  
Pihak Pertama  
**KEPALA BAGIAN  
TATA PEMERINTAHAN,**



**ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.**  
NIP. 19841025 200312 1 003

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023  
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. JEMBER**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100 %
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang dikelola	100 %
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%
4.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100 %
6.	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %
8.	Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%
9.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,14%
10.	Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 27.382.400	P-APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 480.501.191	P-APBD
3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 15.186.284	P-APBD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 309.660.400	P-APBD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 172.361.000	P-APBD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 20.100.000	P-APBD
7. Penataan Organisasi	Rp. 24.005.800	P-APBD
8. Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 543.346.235	P-APBD
9. Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 474.209.900	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.066.753.210,-</b>	

Jember, 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEMBER,  
  
**HADI GASMITO, S.H., M.Si**  
NIP. 196804071998031009

KEPALA BAGIAN  
TATA PEMERINTAHAN,

  
**ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.**  
NIP. 19841025 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. SUDARMAN NO. 01 ☎ (0331) 485162 JEMBER 68118

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2024**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	100%	Rp. 26.945.900
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	100%	Rp. 1.700.076.968
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp. 10.758.070

Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dikelola	100%	Rp. 378.170.275
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	Rp. 159.051.937
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi	86%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	Rp. 23.100.000
Peningkatan Kualitas Laporan	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase urusan pemerintah	86%	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	100%	Rp. 162.443.490

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Daerah Kabupaten/ Kota	an daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi					
Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,60%	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	98,73%	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	96,60%	Rp. 2.542.846.960
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fungsi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	98,73%	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	Rp. 682.606.400

Jember, 22 November 2023  
Kepala Bagian Tata Pemerintahan



**ERVAN SETIAWAN, S.STP., MM.**  
NIP. 19841025 200312 1 003

Lampiran : .....

No : **065/ 178.1 /1.11/2023**

Tanggal : 12 April 2023

## **INDIKATOR KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan
- Tujuan : Tersedianya Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)
- Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan dan Kerja sama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintah dan Kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
  - b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan Kerjasama, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
  - c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, otonomi daerah;
  - d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya; dan
  - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melaporkan data/isian kewenangan urusan}}{\text{Jumlah OPD pengampu urusan LPPD}} \times 100\%$	Data LPPD Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>a. Tersedianya Dokumen LPPD</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas Waktu Pengiriman LPPD Perangkat Daerah Bulan Februari telah diterima oleh Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Penyusunan LPPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007</li> <li>- Capaian kinerja Kabupaten merupakan agregasi dari capaian kinerja OPD se- Kabupaten Jember yang perlu dikoordinasikan terkait validitas data</li> <li>- Seluruh elemen data harus bersumber dari kinerja masing-masing OPD buka data BPS kecuali data PDRB dengan dilampiri dokumen pendukung yang disampaikan kepada Tim Penyusun LPPD Kabupaten untuk didokumentasikan</li> <li>- Pemingkatan nilai LPPD berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) daerah dan Pusat</li> <li>- Hasil evaluasi Tim EKPPD akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya</li> </ul>		

Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah	Persentase administrasi Tata pemerintahan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan yang Terfasilitasi}}{\text{Jumlah Capaian Administrasi Tata Pemerintahan sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Administrasi Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan</li> <li>- Rapat Rakor Camat</li> <li>- Laporan PATEN Kecamatan</li> <li>- Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</li> <li>- Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah</li> </ul> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Monitoring Kecamatan/Kelurahan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan dan Kelurahan yang melaksanakan disiplin kerja sesuai dengan peraturan (PP 94 Tahun 2021)</li> <li>- Camat yang menempati rumah dinas di wilayah kerjanya</li> <li>- Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan pengawasan melekat di lingkungan kerjanya</li> <li>- Jumlah kasus pelanggaran disiplin kerja yang terjadi (semakin menunjukkan disiplin kerja dapat berjalan) dan tingkat disiplin kerja meningkat</li> </ul> </li> <li>2. Rapat Rakor Camat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Rapat Koordinasi Camat dalam rangka menindaklanjuti keadaan dinamis yang berkembang di lapangan, sosialisasi kebijakan pemerintahan di wilayah kecamatan</li> </ul> </li> <li>3. Laporan PATEN Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kecamatan yang melaksanakan ketentuan administrasi dalam layanan kepada masyarakat (kelengkapan administrasi, SOP layanan ,waktu layanan feasible )</li> <li>- Kebijakan kecamatan yang mendukung pelaksanaan</li> </ul> </li> </ol>		

		<p>PATEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan lintas OPD dalam koherensi dan sinkronisasi pelayanan terpadu di kecamatan</li> </ul> <p>4. Pelaksanaan Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya Upacara HUT Jember dan HUT Jatim</li> </ul> <p>5. Rupabumi/Toponimi dan Batas Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Rupabumi/Toponimi yang masuk dalam aplikasi SINAR BIG (Badan Informasi Geospasial)</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Kerjasama Daerah	Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan}} \times 100\%$	Data Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Capaian Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI</li> <li>- Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO</li> <li>- Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah.</li> </ul> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <p>1. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata laksana kerjasama daerah sesuai dengan aturan yang masih berlaku (Permendagri 22 tahun 2020)</li> <li>- Kerjasama sama dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik antar daerah dan pihak ketiga</li> <li>- Kerjasama dilakukan dengan terlebih dahulu menyepakati nota kesepahaman ( MOU) yang secara teknis akan diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama</li> </ul>		

		(PKS) yang memuat hal substantive 2. Pelaksanaan kegiatan RAKERWIL APKASI - Terlaksananya kegiatan RAKERWIL APKASI 3. Keikutsertaan pada kegiatan APKASI OTONOMI EXPO - Partisipasi dalam kegiatan APKASI OTONOMI EXPO 4. Rapat dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember dalam setiap pengambilan kebijakan kerja sama daerah. - Terlaksananya rapat dengan TKKSD		
--	--	---	--	--

## II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang seharusnya tersusun sesuai ketentuan/pedoman}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<b>Penjelasan:</b> a. Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang seharusnya disusun (7 Dokumen) - RKA - DPA - RKPA - DPPA - RENJA - RENJA PERUBAHAN - LAKIP		

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi kualitas penyusunan sesuai pedoman dan</li> <li>- tersusun tepat waktu</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi keuangan yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Keuangan yang pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi keuangan yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan (6 item):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Belanja Natura dan Pakan Natura</li> <li>- Belanja Perabot Kantor</li> <li>- Belanja Mamin aktivitas lapangan</li> <li>- Belanja tagihan air</li> </ul> <p>Dokumen-dokumen tersebut disajikan dalam Rekapitulasi bulanan</p> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terangngarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> <li>- Terangngarkan sesuai ketentuan Pedum APBD</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Administrasi Barang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun}}{\text{Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi barang yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perubahan</li> <li>- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</li> <li>- Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</li> </ul>		

		<p>b. Tersusun sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> <li>- Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD</li> </ul>		
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase administrasi umum yang terkelola	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Terlaksana sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Administrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		<p>Penjelasan:</p> <p>a. Jumlah administrasi umum yang seharusnya terlaksana di Bagian Tata Pemerintahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Honorarium Pengelola Keuangan</li> <li>- Honorarium Pejabat PBJ</li> <li>- Honorarium tenaga administrasi</li> <li>- Honorarium tenaga kebersihan</li> <li>- Pembayaran internet</li> <li>- Penyediaan pakaian kedinasan (pakaian olah raga, pakai adat)</li> <li>- Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan</li> <li>- Laporan Kunjungan Kerja</li> <li>- Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</li> </ul> <p>b. Tersusun sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teranggarkan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan</li> <li>- Teranggarkan sesuai ketentuan Pedum APBD</li> </ul>		

Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Pengadaan barang di Bagian Tata Pemerintahan meliputi: - Barang hasil pengadaan - Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang  b. Tersusun sesuai ketentuan: - Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD		
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Penyediaan jasa di Bagian Tata Pemerintahan meliputi: - Laporan Penyediaan Jasa Surat - Menyurat - Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  b. Tersusun sesuai ketentuan: - Terangankan sesuai nomenklatur belanja dan sub kegiatan - Terangankan sesuai ketentuan Pedum APBD		

Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	$\frac{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara dan Siap Pakai}}{\text{Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara}} \times 100\%$	Data Keuangan dan Perencanaan Bagian Tata Pemerintahan	KPA PPTK PPK-SKPD
		Penjelasan: a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi : - pemeliharaan rutin/ service berkala dan - perbaikan atas kerusakan/ - penggantian spare part b. Barang Milik Daerah yang dipelihara meliputi : - Alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat kantor dan rumah tangga - Komputer		



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ 485162 JEMBER 68118

---

**KEPUTUSAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**Nomor : 065/ 178.1 /1.11/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER 2023**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, maka perlu menyesuaikan indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja pendukung Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Pendukung Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam mendukung tercapainya kinerja utama Bagian Tata Pemerintahan
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan
- KELIMA** : Indikator Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Bagian Tata Pemerintahan
  - b. Perencanaan Tahunan Bagian Tata Pemerintahan
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Tata Pemerintahan

**KEENAM** : Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 12 April 2023

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
KABUPATEN JEMBER**



**ERVAN SETIAWAN, S.STP, MM**

Pembina

NIP. 19841025 200312 1 003

## LAMPIRAN V

### PENGHARGAAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN TAHUN 2023

